



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR: 01/KPTS/PPID/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Daftar Informasi Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 573);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 544);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, meliputi:
- a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
 - b. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; dan
 - c. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini.
- KETIGA : Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi setiap Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KEMPAT : pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor: 01/KPTS/PPID/2021 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Bapak Sekretaris Jenderal;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Forum Konsultasi Pelayanan Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UTAMA
 NOMOR: 01/KPTS/PPID/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
 DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UMUM								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	Seluruh Unit organisasi	Profil Unit Kerja	Seluruh unit eselon II	Seluruh unit eselon II	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	5 tahun	
2.	Seluruh Unit organisasi	Daftar Pejabat Struktural dan/ atau fungsional	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan, di Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	1 tahun	
3.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	2 tahun	

4.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (<i>E-Procurement</i>)	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Berkala, Jakarta	<i>Softcopy</i>	2 tahun	
5.	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian <i>Audited</i>)	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
6.	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan laporan akses (pelayanan) informasi publik	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Setiap enam bulan sekali, Tempat menyesuaikan	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	2 tahun	
7.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang agenda kegiatan Kementerian yang telah, sedang dan akan dijalankan	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan agenda kegiatan, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	2 tahun	
8.	Seluruh Unit organisasi	Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR (Jurnal, Buletin, brosur, pemberitaan <i>website</i> , <i>press release</i>)	Masing-masing unit organisasi/UPT	Masing-masing unit organisasi/UPT	Setiap ada kegiatan dan tempat menyesuaikan	<i>Softcopy</i>	1 tahun	
9.	Seluruh Unit organisasi	Program-program prioritas lingkup Kementerian PUPR	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	

Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
10.	Seluruh Unit organisasi	Agenda Kerja Pimpinan dan Pejabat Eselon I	Sekretariat masing- masing unit organisasi	Sekretariat masing- masing unit organisasi	Apabila ada perubahan, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	1 tahun	
11.	Seluruh Unit Organisasi	Informasi statistik organisasi berupa: a) statistik administrasi; b) statistik kepegawaian; dan c) statistik keuangan.	Masing-masing unit organisasi	Masing- masing unit organisasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	5 tahun	
12.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang tata cara/prosedur pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Apabila ada perubahan, Jakarta	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	Selama masa berlaku	
13.	Seluruh Unit organisasi	Daftar dan dokumen Kesepakatan Bersama/ <i>MoU</i>	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Waktu dan tempat menyesuaikan kesepakatan tersebut	<i>Hardcopy</i>	Selama masa kesepakatan/ <i>MoU</i> berlaku	
14.	Seluruh Unit organisasi	Profil infrastruktur bidang PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Menyesuaikan dengan lokasi infrastruktur	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	Sepanjang infrastruktur masih berfungsi	
15.	Seluruh Unit organisasi	Laporan Barang Milik Negara <i>audited</i>	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun	
16.	Seluruh Unit organisasi	Standar Operasional Prosedur kerja lingkup Kementerian PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	Selama masa berlaku	

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara SERTA MERTA								
17.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang kerusakan infrastruktur PUPR akibat bencana alam	Masing-masing unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Konstruksi)	Masing-masing unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Konstruksi)	Apabila terjadi bencana alam	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 tahun	
18.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang rencana gangguan fungsional terhadap utilitas publik	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Apabila sudah ada rencana gangguan terhadap utilitas publik	<i>Hardcopy</i>	Selama terjadinya gangguan tersebut	
19.	Seluruh Unit organisasi	Informasi progres tanggap darurat bencana	Masing-masing unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Konstruksi)	Masing-masing unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Konstruksi)	Terjadi bencana alam	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 tahun	

20.	Seluruh Unit organisasi	Laporan kejadian bencana	Masing-masing unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Konstruksi)	Masing-masing unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Konstruksi)	Terjadi bencana alam	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	1 tahun	
NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
	1	2	3	4	5	6	7	8

KHUSUS

I. SEKRETARIAT JENDERAL

Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA

1.	SEKRETARIAT JENDERAL	Rekapitulasi informasi realisasi fisik dan keuangan per unit organisasi	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Setiap triwulan, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	2 tahun	
2.		Ringkasan RKAKL dan DIPA kementerian PUPR	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	2 tahun	

3.	Naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian PUPR dan naskah akademisnya	Masing-masing unit organisasi	Unit Kerja Pemrakarsa/ Biro Hukum/Bagian Hukum Pada Unit Organisasi	Setiap ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Selama Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
4.	Daftar Produk Hukum Kementerian PUPR	Biro Hukum	Biro Hukum	Setiap ada penambahan produk hukum, di Jakarta	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>	5 tahun	
5.	Rencana penerimaan calon pegawai	Biro Kepegawaian dan Ortala	Biro Kepegawaian dan Ortala	Jakarta	Dokumen	2 tahun	
6.	Tata cara memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Biro Komunikasi Publik	Biro Komunikasi Publik	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
7.	Laporan Bulanan Bencana	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Bulanan, di Jakarta	<i>Softcopy</i> pada laman sitaba.pu.go.id	2 Tahun	
8.	Monitoring Pagu, Progres Fisik dan Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i> pada laman: https://data.pu.go.id/	10 Tahun	

Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT							
9.	Peta infrastruktur hasil Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kem. PUPR terdiri dari bidang SDA, BM, CK dan Perumahan	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dalam bentuk GISB https://sigi.pu.go.id/ast/	10 Tahun	
10.	Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sejak 2019 di Jakarta	<i>Softcopy</i> pada laman: https://wispu.pu.go.id	Selama masa berlaku	
11.	Laporan Penanganan Bencana	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> pada laman: https://sitaba.pu.go.id/dan <i>Hardcopy</i>	10 tahun	
12.	Rekapitulasi Progres Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur PUPR (Progres Fisik dan Keuangan)	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Setiap hari, di Jakarta (Sistem e-Monitoring DAK)	<i>Softcopy</i>	2 Tahun	
13.	Informasi Status atas Surat Masuk kepada Menteri	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Setiap Saat, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	1 Tahun	
14.	Konfirmasi akses Permohonan Undangan/Audiensi kepada Menteri	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Setiap Saat, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	1 Tahun	

15.		Informasi umum tentang Unit PNPB dan BLU di lingkungan Kementerian PUPR	Biro Keuangan	B Masing-masing unit organisasi	Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun/ selama berlaku	
16.		Daftar informasi publik	Sekretariat Setjen	Biro Komunikasi Publik	Setiap tahun, Jakarta	Dokumen	5 tahun	
17.		Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PHLN	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Setiap triwulan, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	2 Tahun	
18.		Laporan Profil Anggaran Kementerian PUPR	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Setiap triwulan, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	2 Tahun	
19.		Rekapitulasi Progres Kegiatan Kementerian PUPR (Progres Fisik dan Keuangan)	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Setiap Hari, di Jakarta (sistem iemonitoring)	<i>Softcopy</i>	2 Tahun	

II. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)

Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA

1.	INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat (jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	Setiap Semester, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
----	-------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------	--

		Jenderal, jumlah pengaduan masyarakat yang sedang dan yang sudah di tindak lanjuti dalam kurun waktu 5 tahun)					
2.		Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal (Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang sudah di tindaklanjuti/tuntas dan yang belum ditindaklanjuti/belum tuntas (disusun per Unor)	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Setiap Semester, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun
3.		Rekapitulasi Jumlah Pelaporan Gratifikasi (jumlah pelaporan gratifikasi yang sedang ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti)	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	Setiap Tahun, Di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun
4.		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Seluruh Unit Kerja Di lingkungan Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Kerja Di lingkungan Inspektorat Jenderal	Setiap Tahun, Di Jakarta	<i>Softcopy</i>	2 Tahun

5.		Laporan Implementasi SPIP	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	Setiap Tahun, Di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
6.		Prosedur Pengaduan Masyarakat	Inspektorat V, Inspektorat Jenderal	Inspektorat V, Inspektorat Jenderal	Setiap Tahun, Di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
III. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	DIREKTORAT JENDERAL	Peta Wilayah Sungai	Ditjen	Direktorat PJSDA	Pusat	<i>Hardcopy</i>	5 tahun	
2.	SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)	Daftar pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang telah disahkan	BALAI – Direktorat Pembina	BALAI/ Direktorat BPSDA	Daerah/ masing-masing Balai	<i>Hardcopy</i>	20 tahun	
3.		Daftar wadah koordinasi Dewan Sumber Daya Air /TKP SDA	BALAI	BALAI	Daerah/ masing-masing Balai	<i>Hardcopy</i>	5 tahun	

Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
4.		Daftar prasarana dan sarana Sumber Daya Air	BALAI – Direktorat /Pusat Pembina	BALAI- Direktorat /Pusat Pembina	Daerah/ masing- masing Balai dan Jakarta	<i>Hardcopy</i>	5 tahun	
5.		Program-program prioritas Ditjen SDA	Dit. Pengembangan Jaringan SDA	Direktorat/P usat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	5 tahun	
6.		Daftar tinggi muka air waduk	BALAI- Direktorat Bina OP	Balai- Direktorat Bina OP	Daerah/ masing- masing Balai dan Jakarta	<i>Hardcopy</i>	5 tahun	
7.		Rekomendasi Teknis Penggunaan SDA dan/atau Pengusahaan SDA serta	Balai- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA	Balai- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA	Daerah/masi ng-masing balai	<i>Hardcopy</i>	5 (lima) tahun	
8.		Rekomendasi Teknis Persetujuan Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai	Balai- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA	Balai- Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA		<i>Hardcopy</i>	5 (lima) tahun	
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara SERTA MERTA								
9.		Informasi tentang daerah rawan kekeringan	Dit. Bina OP	BNPB	Setiap tahun, Jakarta	<i>Hardcopy</i>	5 tahun	

IV. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.		Informasi Umum Kondisi Jalan dan Jembatan Nasional	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Subdit. Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> <i>Hardcopy</i>	1 tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
2.	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	Leger Jalan	Sekretariat Ditjen	Bagian Keuangan, Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan Bencana	Setiap tahun/ Jakarta	<i>Softcopy/</i> <i>Hardcopy</i>	1 tahun	
3.		Ruang Milik Jalan Tol	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Subdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	Setiap tahun/ Jakarta	<i>Softcopy/</i> <i>Hardcopy</i>	1 tahun	
4.		Pedoman Spesifikasi dan Standar Jalan/Jembatan	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga	Setiap tahun/ Jakarta	<i>Softcopy/</i> <i>Hardcopy</i>	5 tahun	

V. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	Buku Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi	Direktorat SSPIP	Direktorat SSPIP	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
2.		Laporan Padat Karya	Direktorat SSPIP	Direktorat SSPIP	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
3.	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat	Direktorat Air Minum	Direktorat Air Minum	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
4.		Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Direktorat PKP	Direktorat PKP	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
5.		Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Direktorat PKP	Direktorat PKP	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
6.		Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS)	Direktorat PLP	Direktorat PLP	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
7.		Informasi Publik terkait Pelayanan Rumah Negara dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Direktorat BPB	Direktorat BPB	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	

VI. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.		Lokasi Rumah Khusus yang telah terbangun, terhuni, dan diserahkan	Direktorat Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus/ satuan kerja	Setiap ada perubahan agenda kegiatan	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	Sepanjang infrastruktur masih berfungsi	
2.		Mekanisme pengajuan usulan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Umum, perumahan komunitas, dan perumahan skala besar	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
3.		Daftar hasil verifikasi teknis dan lapangan calon penerima PSU	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
4.		Daftar penerima bantuan PSU untuk rumah umum	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
5.		Daftar lokasi bantuan PSU Rumah Umum	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
6.		Daftar Hasil serah terima pekerjaan	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	

7.		Nilai ambang batas pagu untuk pelaksanaan bantuan PSU	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
8.	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN	Iklan Layanan Masyarakat tentang Program Perumahan /Profil Infrastruktur Bidang Perumahan	Setditjen Perumahan	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Menyesuaikan dengan lokasi Infrastruktur	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	Selama infrastruktur masih berfungsi	
9.		Mekanisme Permohonan Bantuan Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	5 tahun	
10.		Profil Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus	Direktorat Rumah Khusus	Menyesuaikan dengan lokasi infrastruktur	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	Sepanjang infrastruktur masih berfungsi	
11.		Tipologi Rumah Susun	Direktorat rumah Susun	Direktorat rumah Susun	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun	
12.		Data teknis Rumah Swadaya (Nama penerima, Alat, Jumlah Bantuan)	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i> pada papan pengumuman kantor desa/kelurahan penerima kegiatan	5 tahun	
13.		Informasi umum Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Basis Data dan Kontak	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun	

		yang dapat dihubungi					
14.		Rekapitulasi data RTLH perkabupaten/kota dan provinsi beserta grafik	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun
15.		Rekapitulasi progres penginputan data dalam sistem yang dilakukan Pemda;	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun
16.		Rekapitulasi data backlog perkabupaten/kota dan provinsi	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun
17.		Rekapitulasi program rumah swadaya dari berbagai sumber	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun
18.		Peta alokasi Rumah Swadaya	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun
19.		Modul pembahasan Fasilitator	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun
20.		Modul Pemberdayaan masyarakat bidang Perumahan Swadaya	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun

21.		Laporan Kegiatan Fasilitas Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Perencanaan Teknik dan Standardisasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun	
22.		Grafik alokasi tahun berjalan dan usulan tahun selanjutnya	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun	
23.		Profil Rumah Swadaya setiap tahun	Direktorat Rumah Swadaya		Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy/ Hardcopy</i>	5 tahun	

VII. DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA

1.	DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Pipeline proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Hardcopy, Softcopy</i>	5 tahun	
2.		Profil proyek KPBU seluruh sektor meliputi <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab proyek - Nilai investasi - Skema kerja 	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Hardcopy, Softcopy</i>	6 tahun	

		<ul style="list-style-type: none"> - sama - Pengembalian investasi - IRR - NPV - Struktur proyek - Timeline pelaksanaan proyek 						
3.		Informasi Umum Mekanisme Kemudahan Bantuan Pembiayaan Perumahan dan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	1 tahun	
4.		Data Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan perbaharuan data minimal seminggu sekali	<i>Softcopy</i>	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	
5.		Data Realisasi Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan perbaharuan data minimal seminggu sekali	<i>Softcopy</i>	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
6.		Informasi Publik terkait Registrasi Pengembang (SIRENG) - Nama Pengembang Sistem	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Tampilan data Pengembangan di aplikasi SIRENG	Per Tahun	-

		Perumahan - Asosiasi tempat Pengembang Perumahan tersebut bernaung - Alamat Pengembang Perumahan - Status Pengembang Perumahan (Terdaftar/Tidak Terdaftar di SIRENG)						
7.		Informasi Publik Simpul KPB - Jumlah Data Proyek KPB meliputi Penyiapan s/d Konstruksi dan Operasi - Informasi terkait profil proyek KPB beserta data teknisnya	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Subdirektorat Kepatuhan Intern	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Informasi dan Data Teknis yang ditampilkan di Website SIMPUL KPB	Per Tahun	
VIII. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.		Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralataan, dan Usaha Jasa Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	5 tahun	

2.	Buku Informasi Teknologi Rumah Tahan Gempa	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralataan, dan Usaha Jasa Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	5 tahun	
3.	Profil Tingkat Komponen Dalam Negeri Proyek Konstruksi	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralataan, dan Usaha Jasa Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	5 tahun	
4.	Profil Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Provinsi/Kabupaten	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tahun 2019 di Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Selama berlaku	
5.	Profil data daerah provinsi mencakup data kegiatan jasa konstruksi, jumlah tenaga kerja bersertifikat, dan instruktur.	Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tahun 2019 di Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Selama berlaku	
6.	Profil Pemberdayaan Hasil Kerjasama Wilayah I	Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tahun 2019 di Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Selama berlaku	

7.		Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah II	Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tahun 2019 di Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Selama berlaku	
8.		Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah III	Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tahun 2016 di Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Selama berlaku	
9.		Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Modul Pelatihan Bidang Jasa Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i>	Selama Berlaku	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
10.	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	Database Katalog Sektoral	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Subdirektorat Advokasi dan Fasilitas Pengadaan Jasa Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i>	1 tahun	
11.		Materi Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Penjaminan dan Pengendalian Mutu	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
12.		Frequently Asked Questions (FAQ) dalam Klikon.pu.go.id terkait Sistem	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy (Sistem)</i>	5 tahun	

		Manajemen Keselamatan Konstruksi					
13.		Data Petugas K3	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun
14.		Materi Bimbingan Teknik Pengadaan Jasa Konstruksi	Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tahun 2019 di Jakarta	<i>Hardcopy</i>	Selama berlaku
15.		Data jumlah tenaga kerja konstruksi, Bimbingan Teknis tenaga kerja konstruksi, Pembekalan dan Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga kerja konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Setiap tahun diwilayahnya	<i>Softcopy</i>	1 Tahun
16.		Data jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Setiap tahun Di wilayahnya	<i>Softcopy</i>	1 Tahun
17.		Materi Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Setiap tahun Di wilayahnya	<i>Softcopy</i>	Selama berlaku

IX. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)	Daftar Informasi Pelatihan	1. Sekretariat BPSDM; 2. Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom)	1. Sekretariat BPSDM; 2. Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom)	Setiap tahun, Jakarta	<i>Hardcopy/ Softcopy</i> (di Kalender Pelatihan/ Lampiran)	1 Tahun	
2.		Jadwal Pelaksanaan Pelatihan/Program Studi dan Mata Kuliah	1. Sekretariat BPSDM; 2. Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) 3. Politeknik PU	1. Sekretariat BPSDM; 2. Pusbangkom Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom); dan 3. Politeknik PU	Setiap tahun, di Jakarta Bandung dan Semarang	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	1 Tahun	
3.		Informasi Pasca Pengembangan Kompetensi	Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom)	Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom)	Setiap tahun, di Jakarta Bandung dan Semarang	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	1 Tahun	
4.		Beasiswa Pendidikan Kedinasan Kementerian PUPR (Beasiswa umum dan Magister Superspesialis)	Sekretariat BPSDM	Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	1 Tahun	

5.		Jadwal Assessment (Penilaian Kompetensi)	1. Pusat Pengembangan Talenta; 2. Balai Penilaian Kompetensi	Balai Penilaian Kompetensi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	1 Tahun	
6.		Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	1. Pusat Pengembangan Talenta; 2. Balai Penilaian Kompetensi	Balai Penilaian Kompetensi	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	1 Tahun	
7.		Pengumuman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik PU	Politeknik PU	Politeknik PU	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	1 Tahun	
8.		Pengumuman Mahasiswa yang diterima di Politeknik PU	Politeknik PU	Politeknik PU	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	1 Tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
9.		Materi dalam Modul dan Kurikulum Pelatihan Bidang PUPR yang dibuat oleh Tim Penyusun Modul dan menjadi hak milik BPSDM	Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom;	Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom	di Jakarta dan Bandung	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	3 tahun	
10.		Rekap Jumlah Peserta untuk setiap jenis Pelatihan	1. Sekretariat BPSDM; 2. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan	Subkoordinasi Evaluasi, Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan	di Jakarta	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	1 tahun	

X. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.		Rencana Strategis Kementerian PUPR	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2021, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	5 tahun	
2.		LAKIP Kementerian PUPR	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasiona	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2021, Jakarta	<i>Hardcopy dan Softcopy</i>	5 tahun	
3.		Rencana Strategis BPIW	Sekretariat BPIW	Sekretariat BPIW	2021, Jakarta	<i>Hardcopy dan</i>	5 tahun	
4.		LAKIP BPIW	Sekretariat BPIW	Sekretariat BPIW	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
5.		Buku Profil Unit Pemilik Resiko T-2 Tahun 2021	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
6.		Rencana Pengembangan Infrastruktur Provinsi 38	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, II, III, dan IV	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, II, III, dan IV	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	

7.		Informasi Sinkronisasi dan Prioritas program Tahunan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan II	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
8.		Informasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR Wilayah: a) Pulau Kalimantan; b) Pulau Jawa; c) Pulau Bali; d) Kepulauan Nusa Tenggara; e) Kepulauan Maluku; f) Pulau Papua	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan II	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
9.		Informasi Pemodelan Analisis Manfaat dan Dampak Investasi Infrastruktur PUPR Berbasis Spasial	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
10.		Informasi Telaahan Isu Strategis Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	

11.		Informasi Penyusunan Teknokratik Perencanaan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah dan Jangka Panjang	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
12.		Informasi Evaluasi Manfaat Infrastruktur PUPR Nasional di Pulau: a) Sumatera b) Kalimantan c) Jawa d) Bali dan Nusa Tenggara e) Sulawesi f) Maluku dan Papua	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
13.		Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan <i>Stunting</i> Kementerian PUPR tahun 2023	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
14.		Informasi <i>Integrated Tourism Master Plan</i> Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	

15.		Informasi <i>Integrated Tourism Master Plan</i> Lombok	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
16.		Buku Deluxe Rencana Induk dan Program Jangka Menengah (PJM)	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III. B	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
17.		Informasi <i>Integrated Tourism Master Plan</i> Danau Toba	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
18.		Informasi <i>Integrated Tourism Master Plan</i> Bromo-Tengger-Semeru (BTS)	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
19.		Informasi <i>Integrated Tourism Master Plan</i> Wakatobi	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	

20.	Informasi <i>Market Analysis and Demand Assesment</i> (MADA) for Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP)	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	
21.	Informasi <i>Market Analysis and Demand Assesment</i> (MADA) for Flores	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 Tahun	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA



ENDRA S. ATMAWIDJAJA
NIP. 19710308199703100

4